

BUKU PEDOMAN LAPANGAN

PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERTANIAN DI PERDESAAN



**BIRO PERENCANAAN
DEPARTEMEN PERTANIAN
2009**



Simpertan @Amil

BUKU PEDOMAN LAPANGAN

PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERTANIAN DI PERDESAAN

301.18

Bin

b.



1.891
april. 15.

**BIRO PERENCANAAN
DEPARTEMEN PERTANIAN
2009**



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT bahwa atas berkat dan rahmat-Nya penulisan buku tentang Penyusunan Model Perencanaan Pembangunan Pertanian di Tingkat Perdesaan akhirnya dapat diselesaikan dengan baik. Buku ini dimaksudkan sebagai acuan yang dapat dipergunakan di tingkat perdesaan untuk menyusun rencana pembangunan pertanian.

Sektor pertanian telah memegang peran penting dalam perekonomian negara. Pada masa krisis ekonomi, hanya sektor pertanian yang mampu bertahan dan tumbuh. Pertanian juga memiliki arti yang strategis karena sektor ini menyediakan kebutuhan paling esensial bagi kehidupan, yaitu pangan, dan saat ini menopang kehidupan lebih dari 63% masyarakat Indonesia.

Tipologi perdesaan di Indonesia sangat beragam karena perbedaan alam pendukungnya, karakteristik sosial budaya, keadaan infrastruktur yang ada, serta kondisi ekonomi masyarakatnya. Kerumitan tipologi dan karakteristik ini tidak mungkin digeneralisasikan dalam proses pembangunan. Membangun masyarakat dan memberdayakan rakyat dapat dilakukan melalui penetapan sebuah program atau proyek pembangunan yang perumusannya dilakukan melalui perencanaan di tingkat masyarakat.

Perencanaan pembangunan pertanian secara partisipatif mempunyai sisi positif karena program yang dijalankan akan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Ini merupakan suatu cara penting untuk menjamin keberlanjutan program, dan juga meringankan beban pusat baik dari sisi dana, tenaga, maupun material. Pada akhirnya, tujuan perencanaan berbasis partisipasi adalah untuk meningkatkan terbangunnya kontrol dan inisiatif masyarakat terhadap pengelolaan sumberdaya untuk pembangunan. Pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan pada tahap perencanaan akan



meningkatkan rasa memiliki terhadap program pembangunan pertanian yang dirancang.

Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada Tim IPB yang diketuai oleh Prof Dr Ir MA Chozin, dengan susunan anggota Prof Dr Ir Sumardjo, Prof Dr Ir Ali Khomsan, dan Ir Dwi Guntoro, MSi yang telah membantu penyusunan buku ini. Semoga buku ini bermanfaat dan dapat diimplementasikan untuk mengisi pembangunan pertanian di Indonesia.

Jakarta, Desember 2009
Kepala Biro Perencanaan

Dr. Ir. Mappaona, MS.
NIP. 19560525.198202.1.001



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
I PENDAHULUAN	1
II. PERENCANAAN PARTISIPATIF DALAM PEMBANGUNAN PERTANIAN DI PERDESAAN ...	3
2.1. Perencanaan Partisipatif.....	3
2.2. Prinsip-prinsip Penyusunan Perencanaan Partisipatif.....	4
2.3. Visi dan Tujuan Perencanaan Partisipatif.....	6
2.4. Unsur-unsur Metode Partisipatif.....	7
III. WAWANCARA PENDALAMAN POTENSI DAN MASALAH PERTANIAN DI PERDESAAN	10
3.1. Pedoman Wawancara.....	10
3.2. Kesalahan-kesalahan dalam Wawancara.....	11
3.3. Pedoman Mengajukan Pertanyaan.....	13
IV. DAUR PERENCANAAN PROGRAM PARTISIPATIF	15



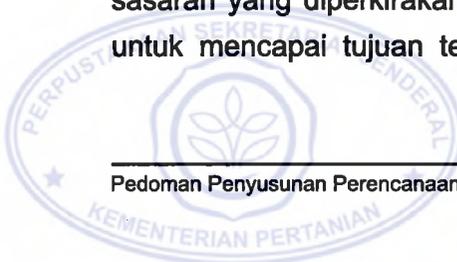
BAB I

PENDAHULUAN

Desa-desanya di Indonesia dengan kegiatan agrarisnya merupakan sumberdaya utama kehidupan dan merupakan unit sosial yang mandiri. Untuk lebih mempercepat pembangunan pertanian di pedesaan, maka wajah "tradisional" pertanian kita perlu lebih dikembangkan ke arah "budaya industri". Berbudaya industri antara lain dicirikan oleh (1) produk yang berstandar dan berkualitas, (2) tepat waktu dalam pasokan produk, (3) sistem permodalan yang kuat, dan (4) sistem manajemen yang akuntabel.

Karakteristik wilayah pedesaan sangat berbeda tipologinya baik karakteristik sosial budaya, keadaan infrastruktur yang ada, keadaan pendidikan di wilayah pedesaan, sampai karakteristik kondisi kemiskinannya. Tipologi desa-desanya di Indonesia sangat beragam, berbeda antar masyarakat di Jawa, berbeda antara Jawa dan luar Jawa, dan berbeda antar komoditas pertanian yang diusahakan. Kerumitan tipologi dan karakteristik ini tidak mungkin digeneralisasikan dalam proses pembangunan. Oleh sebab itu, desentralisasi menjadi penting dalam perencanaan pembangunan pertanian di pedesaan, sehingga pembangunan dapat lebih tepat dalam menjawab kebutuhan masyarakat pedesaan.

Perencanaan adalah sebuah proses yang penting dan menentukan keberhasilan suatu tindakan. Perencanaan pada hakekatnya merupakan usaha secara sadar, terorganisir dan terus menerus dilakukan guna memilih alternatif yang terbaik dari sejumlah alternatif yang ada untuk mencapai tujuan tertentu. Perencanaan juga dapat berarti mengetahui dan menganalisis kondisi saat ini, memperkirakan faktor-faktor pembatas, menetapkan tujuan dan sasaran yang diperkirakan dapat dicapai, mencari langkah-langkah untuk mencapai tujuan tersebut, serta mengevaluasi implementasi



program yang dilaksanakan. Membangun masyarakat pertanian di perdesaan mempunyai makna penting untuk mensejahterakan masyarakat tani sehingga mereka bisa terlepas dari kungkungan kemiskinan. Hal ini dapat diwujudkan melalui perencanaan pembangunan pertanian di perdesaan, yang dirumuskan secara bersama oleh para stakeholders seperti petani, penyuluh pertanian, pemimpin formal dan informal di perdesaan.



BAB II

PERENCANAAN PARTISIPATIF DALAM PEMBANGUNAN PERTANIAN DI PERDESAAN

2.1. Perencanaan Partisipatif

Kegagalan program pembangunan pertanian dan perdesaan di masa lalu adalah disebabkan antara lain karena penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi program pembangunan tidak melibatkan masyarakat. Proses pembangunan seperti ini lebih mengedepankan paradigma politik sentralistis dan dominannya peran negara pada arus utama kehidupan masyarakat.

Beberapa kelemahan utama pola "top down" ini adalah sebagai berikut:

- a) Sering terjadi ketidaksesuaian antara rencana program dengan pelaksana program karena tidak menyentuh kebutuhan praktis yang sesungguhnya dirasakan oleh masyarakat.
- b) Masyarakat hanya pelaksana, tidak memiliki program sehingga dukungannya dan partisipasinya semu.
- c) Kurang mendidik masyarakat dan kurang menjamin keberlanjutan program, keterampilan analisis/pengkajian, perencanaan dan pengorganisasian karena program yang direncanakan hanya dimiliki orang luar.

Mengingat banyaknya kelemahan dari perencanaan yang bersifat "top down", banyak pemikiran untuk menggunakan pendekatan partisipatif yang kemudian menjadi salah satu pendorong lahirnya Undang-undang No. 22 tahun 1999.



Kelahiran Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 yang lebih dikenal dengan UU Otonomi memberikan kesempatan kepada masyarakat desa untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Dengan kesempatan yang diberikan oleh UU No. 22 tersebut hendaknya masyarakat dapat kembali berperan, menemukan jati dirinya yang selama ini hilang, antara lain mencakup: (a) penguatan peran masyarakat (*tidak sekedar peranserta masyarakat*) yaitu menempatkan masyarakat secara bertahap dalam posisi menjadi tuan dan terlibat pada proses pengambilan keputusan dalam pembangunan; dan (b) penguatan semangat *good governance* yaitu adanya transparansi, akuntabilitas, peningkatan profesionalisme, kepedulian terhadap rakyat, dan komitmen moral yang tinggi dalam segala proses pembangunan.

Pendekatan partisipatif sangat sesuai diterapkan untuk perencanaan pembangunan pertanian dan perdesaan mengingat:

- 1) Partisipasi masyarakat atau bottom up planning sudah lumrah dan biasa terjadi di masyarakat untuk keperluan tradisional, yang kita kenal dengan kebiasaan gotong royong.
- 2) Pendekatan ini merupakan metoda yang dapat menjawab kebutuhan masyarakat dan bersifat manusiawi.

2.2. Prinsip-prinsip Penyusunan Perencanaan Partisipatif

2.2.1. Mengutamakan yang terbaik (keberpihakan)

Program partisipatif harus berpihak pada kelompok atau masyarakat yang terbaik. Dengan demikian program yang direncanakan betul-betul menyentuh apa yang dibutuhkan oleh masyarakat.

2.2.2. Pemberdayaan (penguatan) masyarakat

Melalui pendekatan partisipatif, masyarakat memiliki akses (peluang & kesempatan) dan kontrol (kemampuan mengambil



keputusan dan memilih) yang terjadi di seputar kehidupannya. Selain itu, pendekatan partisipatif harus mengurangi ketergantungan terhadap 'pihak luar'.

2.2.3. Masyarakat sebagai pelaku dan 'pihak luar' sebagai fasilitator

Dalam pendekatan partisipatif, setiap anggota saling belajar dan menghargai perbedaan. Perencanaan dilakukan secara santai dan informal sehingga pihak luar` bukan sebagai tamu asing. Masyarakat merupakan pelaku pembangunan dan pihak luar hanya bertindak sebagai fasilitator.

2.2.4. Triangulasi (*check and re-check*) informasi

Informasi yang diterima oleh masyarakat seringkali beragam. Keragaman informasi tersebut timbul karena perbedaan teknik penyampaian, perbedaan sumber informasi, dan perbedaan latar belakang tim pemandu. Pendekatan partisipatif mengutamakan prinsip triangulasi informasi, yaitu adanya *check and re-check*.

2.2.5. Mengoptimalkan hasil (informasi yang relevan)

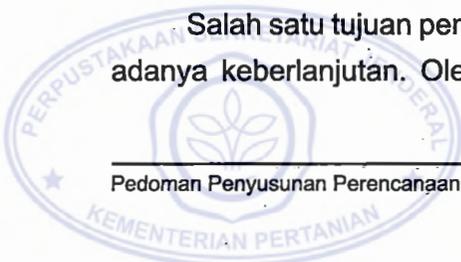
Prinsip penyusunan program partisipatif perlu mengakomodir berbagai masukan, tetapi harus dapat menggunakan informasi yang relevan agar dapat memberikan hasil yang optimal.

2.2.6. Orientasi praktis pengembangan kegiatan

Penyusunan program seringkali menjadi ritual bersifat rutinitas formal sehingga tidak menyentuh substansi dan kehilangan makna hakikinya. Oleh karena itu penyusunan program harus berorientasi praktis pengembangan kegiatan.

2.2.7. Keberlanjutan dan selang waktu (mengikuti perubahan dan perkembangan masyarakat)

Salah satu tujuan pendekatan partisipatif adalah untuk menjamin adanya keberlanjutan. Oleh karena itu dalam penyusunan program



perlu memperhitungkan perencanaan berjenjang berupa program jangka pendek, menengah dan jangka panjang yang secara berkala disesuaikan dengan perubahan dan perkembangan masyarakat.

2.2.8. Belajar dari kesalahan

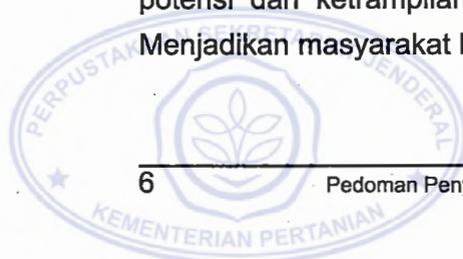
Kegiatan monitoring dan evaluasi dapat mengidentifikasi masalah-masalah dari hasil kegiatan tahun sebelumnya sehingga kita dapat belajar dari kesalahan masa lalu.

2.2.9. Terbuka pada penggunaan teknik yang lebih sesuai dengan kondisi setempat

Banyak metoda yang dapat digunakan dalam penyusunan program partisipatif. Untuk itu metoda atau teknik yang digunakan harus selalu dapat disesuaikan dengan kondisi setempat.

2.3. Visi dan Tujuan Perencanaan Partisipatif

Partisipasi didefinisikan sebagai suatu proses dimana seluruh pihak dapat membentuk dan terlibat dalam seluruh inisiatif pembangunan. Dengan demikian pembangunan yang partisipatif adalah proses yang melibatkan masyarakat secara aktif dalam seluruh keputusan mendasar yang berkenaan dengan kehidupan mereka. Berdasarkan pengertian tersebut, maka visi dan tujuan utama perencanaan partisipatif adalah: (1) melakukan perubahan sosial dan pemberdayaan (penguatan) masyarakat agar terhindar dari ketimpangan sosial. Kesejahteraan sosial seharusnya dinikmati secara adil dan merata; (2) Memberdayakan masyarakat melalui perubahan perilaku dan perubahan sosial. Melalui perencanaan partisipatif diharapkan dapat merubah masyarakat menjadi lebih mampu dalam menganalisis keadaannya sendiri, memikirkan apa yang dapat dilakukan untuk memperbaiki keadaannya, dan mengembangkan potensi dan ketrampilannya untuk memperbaiki kehidupannya; (3) Menjadikan masyarakat lebih kuat, mandiri dan mengerti hak-hak dan



kewajibannya, serta (4) Menjadikan pendidikan masyarakat sebagai pendidikan orang dewasa. Perencanaan partisipatif merupakan pembelajaran melalui kegiatan bersama. Dalam kegiatan ini melibatkan pihak luar yang berperan bukan sebagai gur, tetapi sebagai fasilitator dan atau pemandu belajar sehingga akan terjadi saling berbagi pengetahuan dan pengalaman.

2.4. Unsur-unsur Metode Partisipatif

Terdapat tiga unsur utama dalam perencanaan partisipatif, yaitu proses belajar, alat belajar dan hasil belajar.

2.4.1. Proses belajar

Keterlibatan seluruh komponen masyarakat dalam proses perencanaan partisipatif adalah suatu keharusan. Meskipun demikian, karena masih dalam proses belajar, ditemukan dominasi perencanaan dari tingkat atas. Oleh karena itu untuk meningkatkan proses belajar masyarakat masih diperlukan adanya fasilitator, penggerak atau agen pembangunan yang berperan sebagai: (1) katalisator yang menggerakkan masyarakat agar mau melakukan perubahan, (2) membantu pemecahan masalah, dan (3) membantu penyebaran inovasi, serta memberi petunjuk bagaimana mengenali dan merumuskan kebutuhan, mendiagnosa permasalahan dan menentukan tujuan serta mendapatkan sumber-sumber yang relevan, memilih dan mengevaluasinya, serta (4) menghubungkan dengan sumber-sumber yang diperlukan.

2.4.2. Alat Belajar

Mengingat sifat pengelolaan pembangunan pertanian di pedesaan meliputi banyak aspek dan memiliki keterkaitan dengan banyak pihak, maka banyak pilihan teknik perencanaan partisipatif yang perlu disesuaikan dengan kondisi desa dan tujuan perencanaan. Beberapa metoda perencanaan partisipatif yang banyak digunakan adalah sebagai berikut:

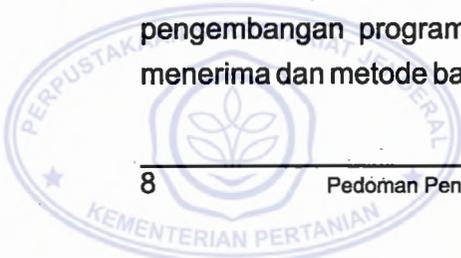
2.4.2.1. Metode ZOPP

Metode ini merupakan perencanaan proyek yang berorientasi pada tujuan. Perencanaan partisipatif dengan metode ZOPP dilakukan dengan menggunakan empat alat kajian dalam rangka mengkaji keadaan desa. Keempat kajian tersebut adalah: (a). Kajian permasalahan, (b). Kajian tujuan, (c). Kajian alternatif dan (d). Kajian peran. Melalui penggunaan keempat alat kajian tersebut, metode ZOPP bertujuan untuk mengembangkan rancangan proyek yang taat azas dalam suatu kerangka logis. Perencanaan dengan metode ini mempunyai kegunaan untuk meningkatkan kerjasama semua pihak yang terkait, mengetahui keadaan yang ingin diperbaiki, merumuskan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang diinginkan dan sebagai dasar pelaksanaan proyek.

2.4.2.2. Metode *Participatory Rural Appraisal* (PRA)

Metode ini merupakan metode pendekatan belajar tentang kondisi dan kehidupan pedesaan dari, dengan dan oleh masyarakat desa sendiri. Pengertian belajar di sini mempunyai pengertian yang luas meliputi kegiatan mengkaji merencanakan dan melaksanakan. Tujuan utama dari metode PRA adalah untuk menghasilkan rancangan program yang lebih sesuai dengan kebutuhan riil keinginan dan keadaan masyarakat. Lebih dari itu, PRA juga bertujuan memberdayakan masyarakat, dengan pengembangan kemampuan masyarakat dalam mengkaji keadaan mereka sendiri, kemudian melakukan perencanaan dan melaksanakannya. Pada prinsipnya metode ini mempunyai kesamaan dengan metode ZOPP, yaitu adanya keterlibatan masyarakat secara langsung dan adanya pemandu.

Keunggulan metode PRA adalah penekanannya bukan pada kemampuan teknik-teknik PRA dalam partisipasi pengumpulan data, penggunaan alat kajian dan prinsip kepemanduan. Penekanannya lebih pada proses belajar masyarakat dan tujuan praktis untuk pengembangan program. Metode PRA juga bersifat terbuka dalam menerima dan metode baru yang dianggap sesuai.



2.4.2.3. Metode *Rapid Rural Appraisal* (RRA)

Metode ini merupakan teknik partisipatif yang digunakan sebagai langkah awal untuk memahami situasi setempat. Metode ini dilaksanakan dalam waktu singkat dengan menggali informasi terhadap hal-hal yang telah terjadi, kemudian mengamati dan melakukan wawancara langsung. Hasilnya diumpankanbalikkan oleh Tim kepada masyarakat sebagai dasar perencanaan.

2.4.3. Hasil Belajar

Berdasarkan hasilnya perencanaan partisipatif dapat dikelompokkan menjadi dua: (1) hasil jangka pendek (rencana program), merupakan hasil dari tujuan jangka pendek, yaitu menyelenggarakan kegiatan bersama untuk mengupayakan pemenuhan kebutuhan praktis dan peningkatan kesejahteraan masyarakat selaligus sebagai sarana prosres belajar; (2) tercapainya tujuan jangka panjang, yaitu tercapainya tujuan strategis, membawa visi PRA untuk mencapai pemberdayaan masyarakat dan perubahan sosial melalui pengembangan masyarakat dengan pendekatan pembelajaran.



yang dikumpulkan adalah informasi yang mempunyai nilai kebenaran. Beberapa kesalahan yang umum terjadi dalam wawancara adalah sebagai berikut:

1. Pewawancara (dalam hal ini Penyuluh Pertanian) kurang sabar dan cermat dalam mendengarkan jawaban-jawaban informan.
2. Pewawancara mengulang-ulang pertanyaan yang sebenarnya sudah jelas, hal ini dapat menimbulkan kebosanan atau bahkan kebingungan bagi informan.
3. Pewawancara membantu mengarahkan atau bahkan memberikan jawaban sehingga jawaban tersebut sebenarnya bukan jawaban informan.
4. Pertanyaan yang diajukan pewawancara tidak jelas sehingga antara pertanyaan dan jawaban tidak sinkron (tidak *nyambung*).
5. Pertanyaan yang diajukan pewawancara bersifat sensitif sehingga informan kikuk untuk menjawabnya.
6. Pewawancara mengkritik jawaban-jawaban yang diberikan informan sehingga informan menjadi kurang bergairah untuk menyatakan pendapatnya.
7. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan pewawancara condong ke arah jawaban tertentu dan bersifat tidak netral.
8. Pewawancara kurang tegas dan membiarkan informan bertele-tele menyampaikan jawabannya yang mungkin kurang selaras dengan pertanyaan yang diajukan.
9. Pewawancara terlalu bergantung pada informan senior (tua dari segi umur), informan terdidik, atau informan kaya; karena mereka dianggap dapat memberikan jawaban secara lebih runut dan dipandang memahami masalah, padahal belum tentu demikian.



10. Pewawancara kurang menaruh perhatian pada hal-hal yang kurang sesuai dengan gagasan atau konsepnya sendiri; hal ini menyebabkan pewawancara suka menginterupsi atau memotong jawaban informan.
11. Pewawancara terlalu memberikan tekanan pada jawaban yang mengandung data kuantitatif, padahal permasalahan pembangunan pertanian di perdesaan juga perlu didalami dengan pendekatan kualitatif.
12. Pewawancara kurang mampu mencatat dengan lengkap jawaban-jawaban informan dan ini menyebabkan hilangnya informasi penting, oleh sebab itu selain menggunakan catatan disarankan juga penggunaan alat bantu lain misalnya *tape recorder*.

3.3. Pedoman Mengajukan Pertanyaan

Mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan untuk menjangkau informasi terkait dengan perencanaan pembangunan pertanian di perdesaan memerlukan formulasi dengan bahasa yang baik dan mudah dipahami. Hal ini juga harus dibarengi dengan kemampuan atau ketrampilan mengajukan pertanyaan pada informan sehingga jawaban-jawaban yang disampaikan sesuai dengan pertanyaan yang diajukan. Pedoman mengajukan pertanyaan diuraikan di bawah ini :

1. Pewawancara hendaknya memulai dengan pertanyaan-pertanyaan yang mudah dijawab, dan meletakkan pertanyaan yang sulit di bagian akhir dari wawancara.
2. Jangan memberikan kesan kepada informan bahwa mereka harus mengetahui jawaban atas semua pertanyaan yang diajukan kepadanya.
3. Hindari penggunaan kata-kata yang sensitif atau ungkapan yang emosional seperti *rakus, tertindas, tidak bermoral* dsb.

4. Jangan membuat praduga misalnya dengan bertanya: *Berapa anak ibu? (sebelum tahu ibu itu telah menikah)*.
5. Struktur kalimat pertanyaan harus mudah dipahami sehingga tidak membingungkan informan untuk menjawabnya.
6. Pergunakan cara berbeda untuk mengajukan pertanyaan yang sama, hal ini akan lebih memperjelas maksud pertanyaan tersebut dan menghindari salah jawaban dari informan.



BAB IV

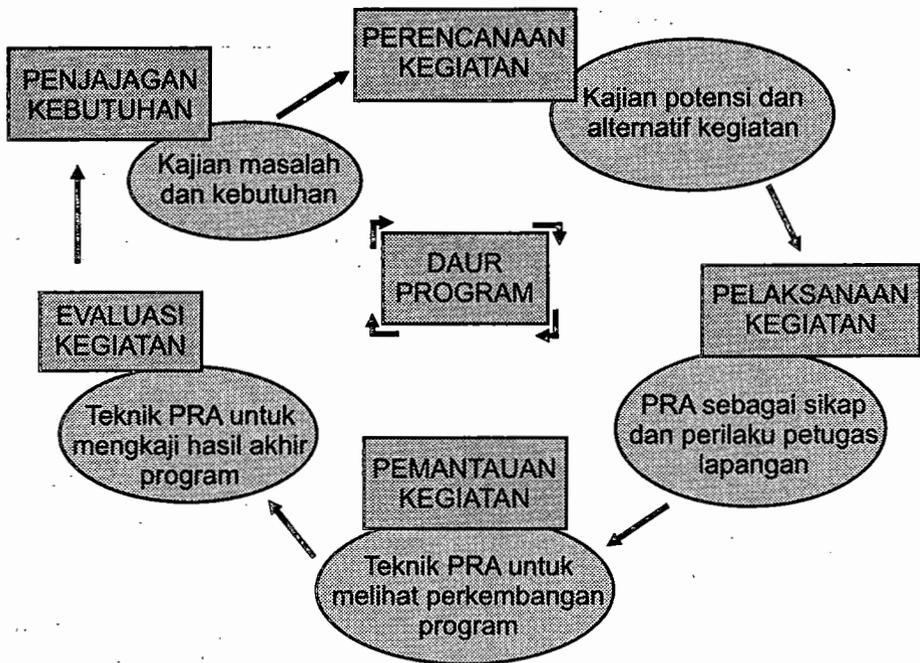
DAUR PERENCANAAN PROGRAM PARTISIPATIF

Setelah perencanaan yang sifatnya terpusat dinilai kurang berhasil memberikan manfaat bagi upaya memenuhi kebutuhan masyarakat, maka kemudian banyak dikembangkan pendekatan yang lebih partisipatif. Hal ini banyak diungkapkan oleh berbagai pihak dalam berbagai kesempatan pembahasan lokakarya tentang manajemen pemberdayaan masyarakat (PKPM-BAPPENAS-JICA, 2004). Perencanaan partisipatif dinilai lebih efektif membangun inisiatif lokal (BKPN-BAPPENAS-JICA, 2006). Pendekatan partisipatif ini tidak hanya efektif dalam perencanaan namun juga dalam upaya monitoring kegiatan pemberdayaan masyarakat (BKPM-BAPPENAS-JICA, 2006a).

Teknik-teknik Partisipatif dapat dan belakangan ini bahkan sering digunakan untuk kebutuhan yang berbeda dalam daur program, antara lain untuk keperluan-keperluan berikut:

1. Penerapan untuk penjajagan kebutuhan;
2. Penerapan untuk perencanaan program;
3. Penerapan untuk evaluasi program;
4. Dan sebagainya:
 - Penerapan untuk kajian gender dalam kegiatan usahatani;
 - Penerapan untuk program PHT;
 - Penerapan untuk penyusunan rencana pembangunan desa;
 - Penerapan untuk program perkebunan rakyat;
 - Penerapan untuk pengembangan ekonomi lokal.





Gambar 1. Daur Perencanaan Program Partisipatif

Berdasarkan pengalaman dari penerapan teknis partisipatoris tersebut, kegiatan perencanaan partisipatif dalam daur program seyogyanya dilaksanakan dengan mengikuti langkah-langkah berikut:

- 1) Penjajagan/pengenalan kebutuhan:
 - a) Pengenalan masalah yang menimbulkan kebutuhan.
 - b) Kebutuhan untuk mengatasi masalah yang mengganggu kesejahteraan hidup masyarakat.
 - c) Pengenalan potensi masyarakat dan keswadayaannya.
- 2) Perencanaan kegiatan:

Apa, kenapa, siapa, kapan, dimana, bagaimana caranya, berapa biaya?
- 3) Pelaksanaan pengorganisasian kegiatan: penjadwalan, pembagian tugas, pengorganisasian, kepemimpinan oleh masyarakat.

4) Pemantauan kegiatan

Melihat kesesuaian dengan rencana, perbaikan atas penyimpangan.

5) Evaluasi Kegiatan, yaitu:

Melihat perkembangan/perubahan yang terjadi: Tujuan mana saja telah/belum tercapai dan penyebabnya. Pengaruh program terhadap kesejahteraan masyarakat pertanggungjawaban pendamping program.

Setiap perencanaan program harus sudah mencakup indikator-indikator monitoring dan evaluasi yang diturunkan dari tujuan dan sasaran program. Sebagai arahan dalam menyusun indikator, hal-hal berikut ini dapat dijadikan acuan:

1. Seberapa jauh partisipasi masyarakat dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi hasil, serta sejauh mana masyarakat mendapatkan manfaat dari kegiatan?
2. Seberapa jauh petugas berfungsi sebagai fasilitator program?
3. Bagaimana pendapat petani tentang kegiatan yang direncanakan (seberapa jauh telah sesuai dengan potensi dan kebutuhan lokal)?
4. Seberapa jauh terjadi peningkatan dalam pengetahuan, sikap, ketrampilan, motivasi, nilai, dan norma kelompok?
5. Seberapa jauh terjadi peningkatan perilaku (*capacity building*) kelompok sasaran?
6. Seberapa jauh jangkauan manfaat bagi masyarakat luas?

Contoh-contoh untuk format perencanaan yang dilakukan oleh beberapa pihak baik dalam lingkup Deptan maupun Bappenas dapat dilihat Tabel 1, Tabel 2, Tabel 3 dan Tabel 4.



Tabel 1. Contoh Membuat Rencana Aksi Program Pembuatan Irigasi Desa**A. Rencana Aksi**

No.	Kegiatan	Indikator	Target	Penanggung jawab
1.	Pertemuan Desa	- Jumlah dukungan dan partisipasi - Ada struktur dan mekanisme panitia	150 orang 10 orang panitia di masing-masing dusun (terwakili)	Sekdes, 10 orang panitia
2.	Pembentukan kelompok	Keterlibatan kelompok	150 orang/100%	Ketua Kelompok Tani
3.	Survey lapangan	Sketsa saluran	2 m x 5000 m	
4.	Pengukuran	Lebar dan panjang saluran	2 m x 5000 m	
5.	Pembuatan gambar	Peta saluran dan gambar	1 peta dan gambar saluran irigasi	
6.	Pengumpulan material	Ada batu, ada pasir, ada tanah, ada batang kayu (lok)	Masing-masing kelompok 20 kubik	
7.	Pertemuan desa dua	Pembagian jadwal kerja	- Masing-masing kelompok memiliki jadwal kerja - Ada solusi	
8.	Pelaksanaan pembuatan irigasi	Tersedia saluran irigasi	2 m x 5000 m	
9.	Monitoring	Laporan perkembangan	5 kali monitoring	
10.	Evaluasi	Rencana kerja tindak lanjut	- Pemeliharaan jalan - Peningkatan kualitas jalan	

Tabel 2. Contoh Matrik Program Kerja Tahunan dalam Implementasi

No.	Kegiatan	Lokasi	Waktu	Tujuan	Sasaran	Hasil	Penanggung Jawab*)	Dana
1.	Pertemuan Desa (1)	Balai Pertemuan Desa	Juni 2004	Menyampaikan rencana kerja Membagi peran masing-masing <i>stakeholder</i> Membentuk panitia pelaksana	Masyarakat Desa	Masyarakat memahami tentang rencana kegiatan Adanya komitmen masyarakat untuk ikut mensukseskan kegiatan Setiap <i>stakeholder</i> memahami peran masing-masing Terbentuknya panitia pelaksana	Kepala Desa Panitia	Swadaya: ibu-ibu membuat minuman dan makanan
2.	Pembentukan Kelompok	Balai Pertemuan Desa	Juni 2004	Memudahkan pengaturan pembagian kerja	Masyarakat desa	Terbentuknya kelompok (75 anggota) Adanya rasa tanggungjawab masing-masing kelompok	Kepala Desa	Swadaya
3.	Survey Lapangan	Sepanjang jalur yang direncanakan	Juni 2004	Pemetaan jalur irigasi yang akan dikerjakan	Desa Kita	Adanya peta/sketsa irigasi Teridentifikasi pemilik irigasi	Panitia	Swadaya (Kelompok I)
4.	Pengukuran saluran irigasi	Sepanjang jalur irigasi yang direncanakan	Juni 2004	Mengetahui luas lahan yang terpakai	Jalur Irigasi yang akan dikerjakan	Adanya ukuran irigasi yang pasti/disepakati	Panitia	Swadaya (Kelompok II)

*) Catatan: Penanggungjawab seyogyanya disebutkan acara secara jelas nama atau statusnya dalam masyarakat

Tabel 2. (Lanjutan)

No.	Kegiatan	Lokasi	Waktu	Tujuan	Sasaran	Hasil	Penanggung jawab	Dana
5.	Pembuatan gambar jalur saluran irigasi	Sepanjang jalur irigasi	Juni 2004	Menjadi pedoman pengerjaan irigasi	Jalur irigasi	Adanya gambar jalur saluran irigasi	Panitia	Swadaya (Kelompok)
6.	Pengumpulan material	Desa Kita semua	Juli 2004	Pembuatan saluran	Kelompok kerja	Terkumpulnya materia	Kelompok Kerja	Swadaya (Kelompok I)
7.	Pertemuan desa (II)	Balai Pertemuan Desa	Juli 2004	Memantapkan jadwal kerja Mengecek persiapan masyarakat	Kelompok dan masyarakat	Adanya jadwal kerja Teridentifikasi kesulitan-kesulitan yang dihadapi kelompok	Panitia	Swadaya (Panitia)
8.	Pelaksanaan pelebaran saluran irigasi	Desa Kita Semua	Juli-Nov 2004	Terbentuknya saluran irigasi yang lebar	Masyarakat desa kita semua	Adanya saluran irigasi yang lebar	Panitia dan kelompok	Swadaya (Kelompok I dan Kelompok II)
9.	Monitoring	Desa Kita Semua	Juni-selesai	Memantau capaian dari setiap aktivitas	Setiap kegiatan	Ada progress/perkembangan kegiatan	Panitia	Swadaya (Kepala Desa dan Panitia)
10.	Evaluasi	Balai pertemuan	Desmber	Menilai kegiatan yang sudah dilaksanakan	Panitia dan kelompok kerja	Ada rencana tindak lanjut Adanya pengalaman dan pembelajaran berharga yang bisa dipetik	Panitia	Swadaya (Kepala Desa dan Panitia)

Tabel 3. Contoh Program Pemberdayaan Lembaga Keuangan Desa Melalui Pendekatan Kemitraan

No.	Jenis Kegiatan	Siapa Penanggung Jawab?	Kapan	Dimana	Sumber Biaya (Rp)	Indikator
1.	Diklat. Man. Keuangan	Masyarakat & Pemerintah Desa	Juni 2004	Balai Desa	2.500.000 (Kas Desa & Pemda)	15 orang pengurus yang memiliki ketrampilan administrasi keuangan
2.	Pengembangan Modal	Perbankan, Pemda	Juli-Nov 2004	LKD Kabul	100 juta (Bank & Pemda)	Meningkatnya modal LKD dari 2.500.000 menjadi 102.500.000
3.	Pendampingan kepada LKD	Fasilitator/NGO/LSM Siklus	2004-2007	Desa Kabul	NGO, Pemda, Donor	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peningkatan kompetensi LKD ▪ Tersusunnya system & mekanisme LKD
4.	On The Job Training	Bank, Koperasi	2004	Kantor Bank & Koperasi	Kas LKD	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Meningkatnya ketrampilan pengelolaan keuangan dan aset LKD ▪ Meningkatnya ketrampilan pelayanan kepada masyarakat

Tabel 4. Contoh Matrik Program Implementasi

No.	Kegiatan	Penanggung Jawab	Target	Hasil	Indikator
I.1.	Persiapan <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembentukan panitia ▪ Pendaftaran peserta ▪ Penetapan infrastruktur ▪ Penetapan jadwal, dll 	Ketua LKD & Fasilitator	Terbentuknya <ul style="list-style-type: none"> ▪ Panitia pelatihan ▪ Kesiapan T4, peserta 15 orang dengan struktur 3 orang 	100%	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Panitia ada pembagian peran dan rincian tugasnya ▪ Ada T4 dan kelengkapan lain, kesiadaan peserta dan infrastruktur fasilitator
2.	Pelaksanaan <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembukuan ▪ Proses belajar untuk simulasi/diskusi ▪ Evaluasi ▪ Penutup 	Panitia	15 peserta dapat mengikuti diskusi dengan baik	80%	Proses belajar berjalan tertib dan gejala praktek lancer
3.	Pasca Pelatihan <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kegiatan pendampingan 	NGO/LSM "Siklus"	Hasil pelatihan dapat diaplikasikan praktek	-	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pertukaran regular antara stakeholder ▪ Termonitornya perkembangan peserta di LKD
II.1	Persiapan <ul style="list-style-type: none"> ▪ Membuat rencana kebutuhan modal berdasarkan jumlah nelayan & peralatan yang diperlukan ▪ Menyusun, merumuskan proposal 	Ketua LKD dan Fasilitator	Tersusunnya proposal yang memenuhi syarat	100%	Proposal dengan isi: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Latar belakang ▪ Data kondisi awal masyarakat ▪ Rencana kebutuhan, metode, penyaluran & pengembalian ▪ Lampiran data-data pendukung

Tabel 4. (Lanjutan)

No.	Kegiatan	Penanggung Jawab	Target	Hasil	Indikator
2.	<p>Pelaksanaan</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengajuan proposal pada Pemda dan Bank ▪ Presentasi dan lobi pada Pemda dan Bank ▪ Realisasi kredit ▪ Pemantauan pengelolaan 	Ketua LKD dan Fasilitator	Realisasi kredit sesuai dengan kebutuhan (100 juta)	60% Pemda 10 juta Bank 50 juta	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kesepakatan kedua belah pihak untuk membahas proposal ▪ Realisasi bantuan dari Bank dan Pemda
III.1	<p>Persiapan</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Menyusun rencana pendampingan ▪ Melakukan pendataan kebutuhan permodalan secara partisipatif ▪ Menggali kemampuan nelayan untuk membayar bunga/mengembalikan pinjaman 	Fasilitator LKD Fasilitator	<p>Rencana kerja tahun 2004</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Para nelayan ▪ Studi kelayakan 	100% 100% 100%	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rencana kerja rinci ▪ Data riil nelayan dan kebutuhan ▪ Tingkat kemampuan dapat diketahui
2.	<p>Pelaksanaan</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Menyiapkan/memfasilitasi penyusunan buku kas, aturan main LKD, buku pinjaman, dsb ▪ Memfasilitasi pertemuan-pertemuan LKD ▪ Membantu/memfasilitasi monitoring /penyelesaian kredit bermasalah 	Fasilitator Fasilitator Fasilitator	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Buku-buku pokok LKD ▪ Bulanan, Triwulan ▪ Pemantauan yang rutin 	100% 80% 80%	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Administrasi keuangan tertib & lancar ▪ Pertemuan terlaksana dengan baik ▪ Pengembalian kredit lancar
IV.1	<p>Persiapan</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Menetapkan/seleksi calon peserta magang ▪ Membahas teknis pelaksanaan & pembiayaan magang dengan pihak bank 	LKD LKD & Fasilitator	3 orang Kesepakatan bersama	100% 100%	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Proses seleksi transparansi ▪ Ada aturan main yang disepakati
2.	<p>Pelaksanaan</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Realisasi magang ▪ Monitoring & evaluasi 	LKD & Fasilitator	Peningkatan ketrampilan selama & sesudah magang	100% 80%	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peserta dapat melakukan dengan baik ▪ Menemukan hambatan dan solusi untuk mengatasi

**BIRO PERENCANAAN
SEKRETARIAT JENDERAL DEPARTEMEN PERTANIAN**

Jl. Harsono RM No. 3
Ragunan Pasar Minggu, Jakarta Selatan
Telp./Fax.: 62-21-7804156
Website: www.deptan.go.id

